



LAPORAN KEUANGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

AUDITED

TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyusun Buku Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah yang berbasis AkruaI Tahun Anggaran 2024 pada OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu. Dengan landasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran ini, telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan menyajikan informasi beserta gambaran pelaksanaan anggaran, yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu. Laporan Realisasi Anggaran Keuangan ini, kami buat berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah yang berbasis AkruaI. Dan kami menyadari dengan segala keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran ini. Dan diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Demikian Laporan Keuangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,
terima kasih.

Bengkulu, Desember 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
BENGKULU

SUPRAN, SH., MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19681221 199303 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	5
B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	6
C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	7
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	9
A. Ikhtisar.....	9
B. Hambatan.....	10
C. Manfaat.....	10
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	11
A. Laporan Realisasi Anggaran	11
B. Neraca	14
C. Laporan Operasional	16
D. Laporan Perubahan Ekuitas	17
BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN.....	18
A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu	18
B. Visi, Misi, dan Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu	20
BAB IV P E N U T U P	22



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Batang Hari No.108, Kel.Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Telp: 0736 22044 / Fax: 0736 7342192

Website : <https://www.dpmptsp.bengkuluprov.go.id> | Email : dpmptsp@bengkuluprov.go.id

BENGKULU 38223

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu yang terdiri dari : : (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Neraca, (3) Laporan Operasional (LO), (4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan atas pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bengkulu, Desember 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

SUPRAN, SH., MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19681221 199303 1 002

BAB I PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu selama satu periode pelaporan untuk Tahun Anggaran 2024. Adapun tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang dipercayakan kepada OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
2. Menyediakan informasi Keuangan yang berguna untuk perencanaan dan evaluasi keuangan OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu serta efektivitas kesinambungan pengendalian asset, hutang dan ekuitas.
3. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu, sebagai akibat dari aktivitas keuangan selama tahun anggaran yang berkenaan.
4. Untuk menunjang bagi pihak-pihak yang terkait (stakeholder), mengambil keputusan dan penetapan kebijakan dalam menjalankan pemerintahan pada tahun-tahun berikutnya.

Laporan Keuangan TA 2024 Audited yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu, terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Merupakan laporan yang menyajikan informasi yang berhubungan dengan anggaran keuangan, laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang di kelola oleh OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggaran belanja.

2. Neraca.

Merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu Dinas / Kantor pada periode tertentu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana.

3. Laporan Operasional (LO)

Merupakan laporan menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang mencerminkan dalam pendapatan –LO dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Laporan Perubahan Ekuitas.

Merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang diakibatkan dari surplus/defisit pada satu periode, koreksi atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi atas kesalahan persediaan dari periode sebelumnya serta perubahan nilai aset.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Menyajikan penjelasan naratif, analisa atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Arus Kas. Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Equitas. Laporan Keuangan OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu menyajikan informasi yang berguna bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Negara/Daerah, berdasarkan antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286),
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355),
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4549).

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan.
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024.
- 10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 11. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

C. **Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
	B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
	C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB II	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
	A. Ikhtisar
	B. Hambatan
	C. Manfaat
BAB III	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
	A. Laporan Realisasi Anggaran
	B. Laporan Operasional

	C. Neraca
BAB IV	Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan
	A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
	B. Visi, Misi dan Kinerja Utama
BAB V	PENUTUP

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan digambarkan dari realisasi pencapaian target APBD dan perkembangan realisasi APBD Tahun berjalan, dengan tahun sebelumnya.

A. Ikhtisar.

APBD OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2024, dan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi tentang OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu, beserta Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, diikhtisarkan sebagai berikut :

Tabel : Laporan Realisasi Anggaran 2024 (dalam rupiah)

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN		
	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
PENDAPATAN	-	-	-
BELANJA	Rp.12.845.543.736,00	Rp. 12.391.715.758,00	96,47
SURPLUS (DEFISIT)	Rp.12.845.543.736,00	Rp. 12.391.715.758,00	96,47
PEMBIAYAAN			
- Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
- Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
PEMBAYARAN NETTO	-	-	-
SILPA	-	-	-

Tabel diatas menunjukkan pencapaian target APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Realisasi pendapatan Tahun 2024, tidak ada.
2. Realisasi Belanja Tahun 2024 dibawah pagu anggaran belanja.

Pagu Anggaran Belanja sebesar Rp.12.845.543.736,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp.12.391.715.758,00 atau 96,46 % dari Pagu Anggaran. Belanja tersebut telah memenuhi anggaran belanja DPMPTSP Provinsi Bengkulu.

B. Hambatan.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan :

- Belum profesionalnya Sumber Daya Manusia, dikarenakan kurangnya jumlah PNS dan kurangnya Diklat bagi PNS yang dibutuhkan di OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
- Pencapaian target berbentuk non fisik atau kualitas pelayanan yaitu kepuasan masyarakat.
- Pencapaian Pembuatan SOP Perizinan dan Non Perizinan
- Terlambatnya dalam proses pekerjaan pelaksana teknis untuk menyelesaikan tugas teknis kegiatan.
- PNS / ASN kurang aktif untuk bekerja dalam tim.

C. Manfaat.

- Menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja, surplus/defisit- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran.
- Menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk menandai kegiatan OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA belanja, Transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan yang masing-masing dibandingkan dengan anggaran dalam satu periode.

1. Pendapatan

Pendapatan OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu, pada Tahun 2024, tidak dibebani Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena biaya perizinan dan non perizinan tidak memungut PAD, dibebankan atau dikembalikan pada Dinas/Instansi yang terkait, besaran PAD yang dipungut oleh Dinas/Instansi yang terkait berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu (Pergub) dan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa. Berikut tabel belanja operasi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Operasional	Rp. 12.845.543.736	Rp. 12.391.715.758	96,47	Rp. 14.520.295.723	Rp. 13.964.974.680	96,17
Belanja Pegawai	Rp. 8.753.872.736	Rp. 8.531.327.138	97,45	Rp. 9.544.489.223	Rp. 9.171.895.696	96,09
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.003.362.000	Rp. 3.772.285.620	94,23	Rp. 4.975.806.500	Rp. 4.793.078.984	96,33

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasanya terdapat perubahan secara signifikan anggaran Belanja Pegawai dan belanja barang dan jasa dari tahun 2023 ke tahun 2024. Adanya pengurangan Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, Hal tersebut disebabkan oleh adanya pengurangan belanja Daerah untuk setiap OPD dikarenakan belum stabilnya perekonomian di Indonesia dan adanya kebutuhan lain dalam penganggaran Daerah tersebut yang lebih membutuhkan akhirnya berimbas pada anggaran daerah Provinsi Bengkulu. Realisasi Belanja Operasional Realisasi Belanja Pegawai Rp 8.531.327.138 atau 97,45 % dari anggaran Rp. 8.753.872.736 dan untuk Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp 3.772.285.620 atau 94,23 % persen dari anggaran sebesar Rp 4.003.362.000. dan Untuk Belanja Barang dan Jasa dikarenakan SDM yang belum memadai dan kebutuhan dalam belanja diambil secara signifikan yang memang dibutuhkan oleh DPMPTSP Provinsi Bengkulu. Maka dari itu kebutuhan belanja Barang dan Jasa tidak hanya dapat direalisasikan sejumlah 94% dari anggaran tersebut.

b. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 33.883.000 atau 92,88% dari anggaran sebesar Rp. 36.480.000 dan Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 88.309.000 atau 99,76% dari anggaran sebesar Rp. 88.103.000. Rincian belanja modal adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA MODAL	Rp. 88.309.000	Rp. 88.103.000	99,76	Rp. 183.750.000	Rp. 182.100.000	99,10

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwasanya terdapat perbedaan yang signifikan antara tahun 2023 dan tahun 2024. Dimana Modal berkurang, dikarenakan adanya pengurangan anggaran. Belanja modal hanya diperuntukan untuk Kebutuhan seperti Kursi Tamu untuk Menunjang Pelayanan Perizinan dan Peralatan Elektronik Printer, AC (pendingin), beserta cctv dan peralatan elektronik lainnya yang dapat membantu Kinerja ASN/PNS yang kebutuhannya belum terpenuhi dalam melakukan pekerjaan tersebut. OPD DPMPTSP Provinsi Bengkulu melakukan penambahan anggaran belanja modal untuk

kebutuhan pelayanan perizinan dan sarana prasarana diakhir bulan Oktober 2024 yang dapat menunjang kinerja ASN dan non ASN di OPD PMPTSP Provinsi Bengkulu.

Surplus/Defisit

Uraian	Tahun 2024			2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
BELANJA DAERAH	12.845.543.736,00	12.391.715.758,00	96,47	14.147.074.680,00
BELANJA OPERASI	12.757.234.736,00	12.303.612.758,00	96,44	13.964.974.723,00
Belanja Pegawai	8.753.872.736,00	8.531.327.138,00	97,46	9.171.892.696,00
Belanja Barang dan Jasa	4.003.362.000,00	3.772.285.620,00	94,23	4.793.078.984,00
BELANJA MODAL	88.309.000,00	88.103.000,00	99,76	182.100.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.309.000,00	88.103.000,00	99,76	182.100.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)	12.845.543.736,00	12.391.715.758,00	96,47	14.147.074.680,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	12.845.543.736,00	12.391.715.758,00	96,47	14.147.074.680,00

B. Neraca

Jumlah Aset per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 2.437.619.699,00 dan Rp 2.815.408.177,00 dan jumlah kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 2.437.619.699 dan Rp 2.815.408.

Uraian	2023	2022
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP	2.625.625.562,00	2.384.402.562,00
Tanah	109.060.000,00	109.060.000,00

Peralatan dan Mesin	6.048.147.910,00	5.960.437.910,00
Gedung dan Bangunan	1.976.682.168,00	1.976.682.168,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	48.013.000,00	48.013.000,00
Aset Tetap Lainnya	325.133.000,00	171.620.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	-5.881.410.516,00	-5.881.410.516,00
JUMLAH ASET TETAP	2.625.625.562,00	2.384.402.562,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA	189.000,00	189.000,00
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	44.700.000,00	44.700.000,00
Aset Lain-lain	377.815.942,00	377.815.942,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-44.700.000,00	-44.700.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-377.626.942,00	-377.626.942,00
JUMLAH ASET LAINNYA	189.000,00	189.000,00
JUMLAH ASET	2.625.814.562,00	2.384.591.562,00
KEWAJIBAN	236.815.472,00	8.521.832,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	236.815.472,00	8.521.832,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Utang Pinjaman Jangka Pendek		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja	236.815.472,00	8.521.832,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	236.815.472,00	8.521.832,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Utang kepada Masyarakat		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
JUMLAH KEWAJIBAN	236.815.472,00	8.521.832,00
Ekuitas	2.388.999.090,00	2.376.069.730,00
Ekuitas	-10.002.716.668,00	-11.771.004.950,00
Surplus/Defisit-LO	-12.378.786.398,00	-14.199.667.785,00
JUMLAH EKUITAS	2.388.999.090,00	2.376.069.730,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.625.814.562,00	2.384.591.562,00

C. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh SKPD untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional terdiri dari pendapatan LO, beban, kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Rincian Laporan Operasional adalah Sebagai berikut:

Uraian		2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
	BEBAN	12.378.786.398	14.199.667.785	(1.820.881.387)	(12.82)
	BEBAN OPERASI	12.378.786.398	13.936.269.648	(1.557.483.250)	(11.18)
	Beban Pegawai	8.752.494.503	9.171.895.696	(491.401.193)	(4.57)
	Beban Barang dan Jasa	3.626.291.895	4.764.373.952	(1.138.082.057)	(23.89)
	Jumlah Beban Operasi	12.378.786.398	13.936.269.648	(1.557.483.250)	(11.18)
	Beban Penyusutan dan Amortasi	0	263.398.137	(263.398.137)	(100)
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	222.499.642	(222.499.642)	(100)
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	39.298.061	(39.298.061)	(100)
	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	1.600.434	(1.600.434)	(100)
	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	
	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	
	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-	
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	263.398.137	(263.398.137)	(100)
	JUMLAH BEBAN	12.378.786.398	14.199.667.785	(1.820.881.387)	(12.82)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		(12.378.786.398)	(14.199.667.785)	1.820.881.387	(12.82)
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional					
	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(12.378.786.398)	(14.199.667.785)	1.820.881.387	(12.82)
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	-	-	-	
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	
POS LUAR BIASA					
	Beban Luar Biasa	0	0	0	0
	Jumlah Beban Luar Biasa	0	0	0	0
	Surplus/Defisit – LO	(12.378.786.398)	(14.199.667.785)	1.820.881.387	(12.82)

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwasanya laporan LO beban pegawai dan beban barang dan jasa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 1.557.483.250. Beban Pegawai yang mempunyai selisih penurunan sebesar Rp.491.401.193. Beban Pegawai yang mengalami penurunan disebabkan banyaknya Pegawai yang Pensiun dan Honorarium yang disebabkan belanja barang dan jasa yang berkurang sehingga menyesuaikan honorarium

yang ada. Sedangkan Beban Barang dan Jasa mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp.1.138.082.057. dikarenakan pengurangan anggaran belanja barang dan jasa.

D. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi peningkatan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menghasilkan saldo ekuitas akhir yang berasal dari ekuitas awal ditambah/dikurangi dengan surplus/defiit LO dan peubahan lainnya dengan rincian adalah sebagai berikut:

Uraian	2024	2023
EKUITAS AWAL	2.367.069.730,00	2.428.662.835,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(12.378.786.398,00)	(14.199.667.785,00)
RK PPKD	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	2.388.999.090,00	2.376.069.730,00

1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.2.367.069.730,00 dan Rp.2.428.662.835,00

2. Surplus Defisit LO

Surplus/defisit – LO Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.-12.378.786.398,00 dan Rp.-14.199.667.785,00.

3. Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 2.388.999.090,00 dan Rp.2.376.069.730,00

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Informasi Non keuangan yang dapat dijelaskan pada bagian ini antara lain adalah:

A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu yang merupakan turunan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai rincian fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal.
3. Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu daerah;
4. Perumusan program di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
5. Pembinaan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
8. Pelaksanaan administrasi dinas;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kepala DPMPTSP dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat dan 8 (Delapan) Bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat melaksanakan tugas mengkoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.

3. Bidang Promosi Penanaman Modal

Bidang promosi penanaman modal mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang promosi penanaman modal.

4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam melaksanakan tugas.

5. Bidang Pengolahan Data Dan Informasi Bidang pengolahan data dan informasi

Mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengolahan data serta membangun sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

6. Bidang Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan I Bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan I

Mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan kehutanan, dukcapil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa

7. Bidang Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan II Bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan II

Mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan energi dan sumber daya mineral, pangan, perhubungan, transmigrasi, pariwisata, kesehatan, koperasi ukm, perdagangan, pertanian, peternakan & perkebunan.

8. Bidang Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan III Bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan III

Mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan kelautan perikanan, kebudayaan, statistik, PU & tata ruang, perumahan rakyat & kawasan, pemukiman, perindustrian, kominfo, kepemudaan & olahraga.

9. Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan Bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.

A. Visi, Misi, dan Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu

1. Visi

Peningkatan Investasi yang Berdaya Saing Serta Berkelanjutan melalui Pelayanan Perizinan Prima dengan Aparatur Profesional

2. Misi

- a. Memberikan pelayanan publik yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan tepat serta transparan.
- b. Mewujudkan Pelayanan Perizinan/nonperizinan melalui aparatur profesional dan Pengembangan pelayanan berbasis teknologi.
- c. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya daerah dalam mendukung investasi yang berkelanjutan

- d. Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang berdaya saing dan berkualitas.

3. Kinerja Utama

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam layanan perizinan dan Non Perizinan.
- b. Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu.
- c. Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan tersebut mencakup:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Laporan Operasional (LO);
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- 4) Neraca; dan
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
- 6) Rekap Data lainnya

Dengan keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 diharapkan laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bengkulu, Desember 2024

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU**

SUPRAN, SH., MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19681221 199303 1 002